

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perilaku politik muncul karena adanya sebuah proses yang terkait dengan isu-isu politik. Namun perilaku politik yang lazim berlaku yaitu perilaku politik masyarakat secara umum. Hal ini menjadi unik ketika Etnis Tionghoa beraktualisasi dalam politik praktis. Hal ini menjadi menarik ketika Etnis Tionghoa terlibat aktif dalam proses politik baik di tingkat nasional maupun lokal. Penting untuk dipahami bahwa perilaku politik Etnis Tionghoa merupakan suatu aksi politik yang menarik untuk menjadi sebuah kajian ilmiah. Perilaku politik Etnis Tionghoa memiliki pengaruh yang besar dalam memenangkan calon Wakil mereka di Parlemen maupun pemimpin pemerintah.

Etnis Tionghoa merupakan masyarakat minoritas di Indonesia dan tersebar diseluruh daerah. Di beberapa wilayah perilaku etnis Tionghoa dalam politik tidak terlalu dominan sehingga sangat jarang sekali yang mencalonkan diri sebagai calon Legislatif maupun calon Kepala daerah. Latar belakang pekerjaan mereka yang membuat aktualisasi politik tidak terlalu signifikan. Sehingga rata-rata dari etnis Tionghoa bekerja di bidang swasta. Maka politik politik masyarakat etnis Tionghoa sering pada calon dari Incumbent.

Penulis melakukan pengamatan awal dan realitanya perilaku politik Etnis Tionghoa dalam pemilu sangat aktif, namun keterlibatan dalam politik sangatlah minim. Suku Tionghoa atau Tionghwa/Huaren adalah sebutan di Indonesia hanya untuk orang-orang dari suku atau bangsa Tiongkok. kata “Tionghoa” sering digunakan untuk mengganti kata “Cina” yang memiliki konotasi negatif.

Sebenarnya orang-orang Tionghoa yang berada di Indonesia berasal dari Fujian dan Guangdong bagian Cina Selatan yang terdiri dari suku bangsa seperti Hokkian dan Kanton pada masa Dinasti Tang di daerah Selatan Cina yang merupakan tempat yang sangat strategis untuk perdagangan, hingga timbulah kolega yang berdagang yang melakukan pelayaran, salah satunya di Indonesia.

Politik etnis menjadi ciri khas masyarakat Indonesia, dimana persaingan politik pada umumnya ditandai dengan Premodialisme. Orientasi politik etnis Tionghoa terbentuk karena ada solidaritas di dalam paguyuban dalam menentukan wakil mereka di Parlemen. Proses menonjolkan suatu etnis tertentu dalam organisasi politik disebut saliansi etnis sehingga terdapat partai politik yang diinisiasi oleh orang-orang etnis Tionghoa dengan mengedepankan kepentingan etnisnya (Pratama, 2016)

Sekarang, jumlah penduduk Indonesia yang berasal dari Etnis Tionghoa naik sekitar 1,45% sampai 2,0% setiap tahun. sehingga Indonesia disebut negara pluralisme, dimana terdapat kemajemukan atau masyarakat yang heterogen di setiap wilayahnya. Oleh sebab itu, tidak dapat di pungkiri lagi jika mereka ikutserta berpartisipasi dan andil dalam setiap pemilu pemilu di Indonesia. (Syahputra, 2019)

Dari hasil observasi awal penulis, data masyarakat Etnis Tionghoa di Kabupaten Aceh Tamiang berjumlah kurang lebih 800 jiwa yang bertempat tinggal di Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang.

Pada kongres pemuda 28 Oktober 1998 yang melahirkan sumpah pemuda, seluruh keterwakilan organisasi kepemudaan dari berbagai suku hadir dalam pengesahan sidang kepemudaan Indonesia tersebut. Undang-undang 1945

menyebutkan secara eksplisit bahwa semua warga negara berkedudukan sama didepan hukum. Bung Hatta menyebutkan bahwa etnis Tionghoa mendapatkan kedudukan dan hak yang sama dengan orang Indonesia asli. Zaman reformasi disambut dengan euforia oleh warga Tionghoa di Indonesia, berbagai organisasi berlatar etnis baik yang bersifat politik maupun kelompok kepentingan bermunculan, seperti partai reformasi Tionghoa Indonesia (PARTI) partai Pembaruan Indonesia (Papindo), dan forum masyarakat untuk solidaritas demokrasi Indonesia (Formasi).

Aktualisasi politik sejumlah warga Tionghoa mulai menekuni dunia politik dengan menjadi anggota legislatif (caleg) dari etnis Tionghoa. Lima anggota DPR dan tujuh anggota MPR terpilih berasal dari etnis Tionghoa pada pemilu 2004 jumlahnya meningkat tercatat lebih dari 200 calon legislatif Tionghoa. Hal ini menunjukkan bahwa kini partisipasi politik etnis Tionghoa di era reformasi jauh lebih baik di level nasional. Namun dalam kontestasi politik lokal Etnis Tionghoa tidak terlalu kompetitif dalam proses pemilihan umum maupun pilkada dan hanya menjadi pemilih saja.

Undang-undang kewarganegaraan No.12 Tahun 2006 dan Undang-undang penghapusan deskriminasi RAS dan etnis No. 40 Tahun 2008 aspirasi adanya pahlawan nasional dari warga Tionghoa sebagai bentuk pengakuan dan kesetaraan etnis. (Winarni, 2013) . Maka hak-hak secara politik dari dua regulasi tersebut memberi kebebasan bagi warga Tionghoa untuk berpolitik praktis dalam proses pemilihan. Hal ini dapat menjadi peluang yang bagus bagi warga Tionghoa baik memilih maupun dipilih dalam proses demokrasi.

Identitas merupakan hal yang fundamental pada setiap infraksi sosial dan selanjutnya menentukan bentuk interaksi sosialnya. Dinamika posisi identitas etnis Tionghoa meningkatkan citranya dengan melakukan mobilitas sosial mengadopsi berbagai identitas pada orang eropa sehingga dari waktu-waktu dinamika identitas etnik Tionghoa di Indonesia sangat terkait dengan nuansa politik penguasa, dimana mereka memiliki kepentingan tertentu untuk menempatkan etnis Tionghoa sesuai dengan kemauan politiknya (Eriyanti, 2016)

Etnis Tionghoa di wilayah kota Kuala Simpang jumlahnya sangat signifikan. Pada tahun 2019 yang lalu etnis Tionghoa menjadi perhatian bagi kandidat calon Legislatif. Jika dilihat dari perilaku politik, setiap etnis mempunyai permasalahan politik yang berbeda dalam menentukan Wakil Rakyat. Perilaku etnis Tionghoa tentu berbeda dengan Etnis melayu dan etnis-etnis yang lain, perbedaan tersebut dapat dilihat dari keputusan mereka dengan menentukan pilihan dalam memilih lembaga Legislatif di Kuala Simpang. Dilihat dari latar belakang diatas maka penulis ingin melakukan penelitian yang berjudul : **Perilaku Politik Etnis Tionghoa Dalam Pemilu Legislatif 2019 di Kabupaten Aceh Tamiang**

1.2 Rumusan Masalah

Gambaran latar belakang tersebut menarik untuk menjadi kajian penelitian ini. Ada beberapa permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini, yaitu

1. Bagaimana Perilaku Politik Etnis Tionghoa Dalam Pemilu Legislatif 2019 di Kabupaten Aceh Tamiang?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi perilaku politik masyarakat etnis Tionghoa pada pemilu legislatif 2019 di Kabupaten Aceh Tamiang?

1.3 Fokus Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka kajian penelitian ini terfokus kepada

1. Perilaku Politik Etnis Tionghoa pada Pemilu legislatif 2019 di Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh. Sejauh mana politik bebas aktif etnis Tionghoa dalam setiap konstentasi politik.
2. Faktor yang mempengaruhi politik etnis Tionghoapada pemilihan legislatif 2019 di Kabupaten Aceh Tamiang meliputi figur calon dan juga elektabilitas calon yang menjadi wakil mereka di parlemen.

1.4 Tujuan Penelitian

Kajian penelitian memiliki beberapa tujuan agar mengetahui perilaku politik Etnis Tionghoa. Adapun tujuan penelitian yaitu :

1. Agar mengetahui bagaimana Perilaku Politik Etnis Tionghoa yang muncul di Kabupaten Aceh Tamiang pada pemilihan umum legislatif 2019.
2. Agar mengetahui faktor yang mempengaruhi etnis Tionghoa dalam menentukan calon legislatif dari partai politik yang ada di Kabupaten Aceh Tamiang

1.5 Manfaat Penelitian

Kajian penelitian ini diharapkan bisa di ambil suatu manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini di harapkan bisa untuk mengembangkan substansi bidang perilaku politik etnis Tionghoa dalam Pemilu Legislatif 2019.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat mengetahui Perilaku politik Etnis Tionghoa dalam memilih Wakil Rakyat di Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh.